



Application of Good Governance Principles in Improving the Performance of the State Civil Apparatus (ASN) at the Pesisir Bukit Subdistrict Office, Sungai Penuh City

Awal Khairi

awalkhairi@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA-NUSA) Sungai Penuh Kerinci

ABSTRACT

Application of Good Governance Principles in Improving the Performance of the State Civil Apparatus (ASN) at the Pesisir Bukit Subdistrict Office, Sungai Penuh City. This research aims to find out how the principles of good governance are implemented in improving the performance of the State Civil Apparatus (ASN) at the Pesisir Bukit Subdistrict Office, Sungai Penuh City. The type of research that the author uses is Qualitative research with the Observation Method, where the researcher focuses more on observing the problems that occur so that the researcher relies on data obtained in the field and then analyzes Winartha (2006: 155). Data collection in this research used observation, interview and documentation methods. This research uses data analysis techniques used in qualitative field research in accordance with Nursapia's opinion, namely through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of his research show that the application of Good Governance Principles has an important role in improving the performance of the State Civil Apparatus (ASN) at the Pesisir Bukit Subdistrict Office, Sungai Penuh City.

Keywords: Application Of Principles, Good Governance, Improve Performance

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan setiap negara yang demokratis dalam mengelola pemerintahannya. Pemerintah yang baik bertujuan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita dari negara itu sendiri. Adanya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance*, muncul pandangan atau paradigma baru tentang administrasi yang disebut *good governance*. Diperlukan adanya kesetaraan dan kerjasama yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (Sedarmayanti, 2010:2). Hal tersebut karena *good governance* berkaitan dengan demokrasi.

Good governance sendiri menurut zulkarnain (2002:21) merupakan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, dengan konsep kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia, dengan konsep kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai dua tujuan yakni pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah juga telah menyatakan bahwa pecahnya krisis disebabkan oleh banyak penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, yang dapat merusak hubungan antara penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai hubungan antara penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai hubungan antara kehidupan sosial dan nasional.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *Good Governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. Gambaran buruknya birokrasi antara lain organisasi birokrasi gemuk dan kewenangan antar lembaga yang tumpang tindih, sistem, metode, dan prosedur kerja belum tertib, pegawai negeri sipil belum profesional, belum netral dan sejahtera, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program belum terarah, serta disiplin dan etos kerja aparatur negara masih rendah.

Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting diperhatikan di dalam penyelenggaraan tata kelola pelayanan terhadap masyarakat, karena dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk memulai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja ini penulis mengkorelasikannya dengan prinsip-prinsip dari *Good Governance* agar tercipta kinerja yang lebih terarah dan sistematis.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Dimana peneliti ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga peneliti ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis Winartha (2006: 155). Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang diajak wawancara, di observasi, dimintai memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Pada dasarnya penelitian ini meneliti tentang fenomena pengalaman sosial manusia dilihat dari sudut pandang partisipan dengan mendeskripsikannya.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Sumber data primer merupakan data yang bersifat internal. Artinya, data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara atau secara langsung.

3. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015: 187). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Camat Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

1. Akuntabilitas (Accountability)

UNDP mengemukakan bahwa Akuntabilitas (*Accountability*) adalah dimana pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum),

sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakholders).

Penerapan Akuntabilitas di Kantor Camat Pesisir Bukit sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari adanya koordinasi dan sosialisasi melalui rapat, terjalannya komunikasi dua arah untuk menciptakan komunikasi yang efektif, menjaga kompetensi petugas, menyediakan sarana prasarana yang memadai, adanya komitmen dan tingkat kejujuran serta terselenggaranya mekanisme pelayanan yang sesuai dengan SOP.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan temuan bahwa penerapan prinsip Good Governance dalam meningkatkan kinerja ASN di Kantor Camat Pesisir Bukit meliputi **Akuntabilitas (Accountability)**

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kepada masyarakat pengguna dari setiap aktivitas yang dilakukan di Kantor Camat Pesisir Bukit, akuntabilitas sangat diperlukan oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas harus jujur, struktur disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

Transparansi (Transparency)

Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi yang berkualitas dapat dilihat dari dimensi dalam penyediaan informasi, penyusunan mekanisme peraturan dan peningkatan arus informasi. Dimensi tersebut dapat digunakan untuk mengukur transparansi peningkatan kinerja Aparatur Negeri Sipil. Pelayanan di Kantor Camat Pesisir Bukit terdiri dari pembuatan KTP, pembuatan KK, rekomendasi SKCK, Legalitas mutasi kependudukan, rekomendasi dari perijinan IMB, ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Registrasi Nikah. Penerapan prinsip transparansi di Kantor Camat Pesisir Bukit sudah menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya/tarif dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi melalui media massa.

Efektivitas dan Efisiensi (Effectivitas dan Efficiency)

UNDP mengemukakan Efektivitas dan Efisiensi adalah setiap proses kegiatan dan kelembagaan yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. Penerapan prinsip Efektivitas dan Efisiensi masih kurang optimal, karena masih mempunyai masalah dalam segi kurangnya terlaksananya administrasi penyelenggaraan yang berkualitas dan tidak terselesainya tugas secara tepat waktu sehingga membuat penerapan prinsip Efektivitas dan Efisien tidak berjalan secara maksimal.

Faktor Penghambat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance

Penerapan Good Governance memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintahan pusat maupun masyarakat umum. Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan Good Governance antara lain yaitu meminimalkan agency cost, meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki citra pemerintahan. Penerapan pelaksanaan prinsip Good Governance secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.

Adapun faktor penghambat dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance yaitu, kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip good governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan untuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh sudah diterapkan, seperti pencapaian tujuan dan pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang telah ditetapkan kepada Aparatur Sipil Negara. Penerapan prinsip transparansi dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sudah diterapkan. Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi di Kantor Camat Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh juga sudah diterapkan. Untuk penerapan prinsip Kepastian Hukum disini sudah diterapkan jika ada Aparatur yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan Salah satu prinsip good governance yang paling penting adalah daya tanggap, peneliti menemukan hasil bahwa daya tanggap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh sudah berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke III Jakarta: Balai Pustaka, 2011
- Andi Baso Mappaoddang dari. (2021), Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anwar, Suprijadi. (2005). Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarni. (2010) Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Masanggung.
- Kumoroto, Wahyu. (2005). Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Organisasi Publik, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Mahsun, M.(2006).Pengukuran Kinerja sektor Publik Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Manggaukang. Raba, (2006). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang : UMM Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Musanef ,Rosdakarya.2007. Manajemen Kepergawaaian di Indonesia,jakarta:gunung agung hal 5.
- Moeharino (2012). Pengukura Kinerja Berbasis Kompetensi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muh. Rizky Ridwan Dari. (2017), Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Rima Andini (dkk.), “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara”, eJournal Ilmu Pemerintahan
- R. Terry, George. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, (2006)



- Safrijal. Dkk. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah
- Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998)
- Sayuti Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia : Pendekatan Non Sekuler, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000)
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan yang baik”
Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2010, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja , cetakan kedua, penerbit: Mandar Maju. Bandung
- Sudikno Mertokusumo. (1999) Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: liberty.
- Sugandi. (2011). Administrasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sinambella. (2006). Reformasi pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Suyandi Prawirosentono. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan”. Yogyakarta: BPFE.
- T. Hani Handoko. (2003). Manajemen. Yogyakarta : BPFE UGM
- T. Hani Hani Handoko. (2000) Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, Dan Perilaku, (Yogyakarta : BPFE, Cet. Ke-2
- The Liang Gie. (1998) Administrasi perkantoran Modern, (Liberty, Yogyakarta. Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo: Jakarta
- Veithzal Rivai (2004), Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Waluyo. (2007). Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.
- W. Widjaja .2006. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali
- Zulkarnain (2002:21) Hubungan Kontrol Diri dengan Kreativitas Pekerja. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara